

ANALISIS UPAYA DINAS KOPERASI USAHA, KECIL, MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DKUKMPP) KABUPATEN SOLOK DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Harpindo Nasir

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

Email: harpindonasir@gmail.com

Nurhayati

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

Email: nurhayatie383@gmail.com

Esi Sriyanti

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

Email: sriyantiesi01@gmail.com

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok
Jl. Jend. Sudirman No.6, Kp. Jawa, Kec. Tj. Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat
Jl. Tembok Ampang Kualo Kel, Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok
Telp. (0755) 20565 e-mail: ummy.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the efforts of the Office of Small, Medium, Industry and Trade Cooperatives (DKUKMPP) of Solok Regency in Developing the Potential of Micro, Small and Medium Enterprises. In this researcher, the research method used is qualitative data. Qualitative research with descriptive analysis method. The population in this study was eight (8) people and the samples in this study were the overall efforts of Department of Business Cooperatives, Small and Medium Industry and Trade (DKUKMPP) of Solok Regency in Developing the Potential of Micro, Small and Medium Enterprises in 2020-2021.

The results of the study indicate that the efforts of the Office of Small, Medium, Industry and Trade Cooperatives (DKUKMPP) of Solok Regency in developing MSMEs have been running optimally. The strategy that has been formulated has even been implemented as expected. However, the efforts of MSMEs are still faced with various problems that hinder the implementation of these business developments.

The results of the initial phase of the research show that overall the Office of Small, Medium, Industry and Trade Cooperatives (DKUKMPP) of Solok Regency has formulated a strategy formulation to empower and develop MSMEs through training, counseling, and policies. Meanwhile, in the participatory phase, the level of community participation in programs or activities carried out by the Office of Small, Medium, Industry and Trade Cooperatives (DKUKMPP) of Solok Regency is quite high. This is marked by the interest and participation of large MSME actors in each training/extension held. Meanwhile, the emancipatory phase shows that the development of MSMEs in Solok Regency has been growing.

Keywords: *Effort, Training, Counseling and Policy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Dinas Koperasi Industri Kecil, Menengah, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam Mengembangkan Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah delapan (8) orang dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan upaya Dinas Koperasi, Industri Kecil dan Menengah dan

Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam Mengembangkan Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. pada tahun 2020-2021.

Hasil kajian menunjukkan bahwa upaya Dinas Koperasi Industri Kecil, Menengah, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam mengembangkan UMKM sudah berjalan optimal. Strategi yang telah dirumuskan bahkan telah dilaksanakan seperti yang diharapkan. Namun demikian, usaha UMKM masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan pengembangan usaha tersebut.

Hasil penelitian tahap awal menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Koperasi Industri Kecil, Menengah, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok telah merumuskan formulasi strategi untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM melalui pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan. Sedangkan pada tahap partisipatif, tingkat partisipasi masyarakat terhadap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Industri Kecil, Menengah, dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan animo dan partisipasi para pelaku UMKM besar dalam setiap pelatihan/penyuluhan yang diselenggarakan. Sedangkan fase emansipatoris menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Solok semakin berkembang.

Kata kunci: Upaya, Pelatihan, Penyuluhan dan Kebijakan

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai tumpuan dalam memperoleh pendapatan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2015) menyatakan bahwa persentase Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 90% dan hanya 10% adalah usaha besar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu pilar yang paling utama dalam prekonomian Nasional dengan berwawasan mandiri mempunyai suatu potensi yang sangat besar dalam menciptakan suatu kesejahteraan. Usaha dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini tergolong jenis usaha yang marginal, dengan memanfaatkan teknologi relatif sederhana, tingkat modal yang relatif rendah adanya akses kredit yang rendah, dan cenderung beroentasi pada pasar lokal.

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemerintah kabupaten solok juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pembinaan serta perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah. Melihat besarnya pengaruh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah, maka Pemerintah Kabupaten Solok terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai kesempatan berusaha di bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Kendala lain yang di hadapi dalam menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), masyarakat juga masih menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan iklim usaha seperti: Modal usaha yang kurang memadai, besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan, praktik usaha yang tidak sehat, dan otonomi daerah yang kurang kondusif bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sedikitnya peluang pasar serta keikutsertaan hasil produksi terhadap pameran-pameran Daerah atau Nasional yang dimotori oleh pemerintah.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut (Ina Priamana, 2017) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia yaitu Industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber daya manusia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi (Azqiara, 2019).

2.1.2 Kriteria Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun (Sumodiningrat dan Wulandari, 2015).

Sementara itu Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan, dengan omzet per tahun maksimal Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) (Sumodiningrat dan Wulandari, 2015).

2.1.3 Kriteria Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah (Pasal 1) yaitu:

1. *Usaha Mikro* adalah usaha ekonomi atas nama kepemilikan perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. *Usaha Kecil* adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri dengan atas nama perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
3. *Usaha Menengah* adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri dan/atau badan usaha yang bukan anak/cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Besar yang kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2.1.4 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya.

Usaha mikro kecil merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Usaha-usaha ini umumnya memiliki karakteristik yang hampir sama di setiap wilayah diantaranya memiliki tingkat penghasilan yang rendah, terkelola dengan tidak baik, bahkan dalam beberapa kasus kelompok usaha mikro kecil belum dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain (Isnaini, 2016).

2.1.5 Jenis – Jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam empat jenis, pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut yaitu:

Tabel 2.1
Klasifikasi Asset dan Omzet

Ukuran Perusahaan	Asset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	50 juta – 500 juta	300 juta – 2 miliar
Usaha Menengah	10 juta – 10 miliar	2 miliar – 50 miliar
Usaha Besar	Diatas 10 miliar	Diatas 50 miliar

Sumber: (Jogloabang, 2019)

2.1.6 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut (situs web **Intermezzo, 2018**) mengungkapkan ada lima permasalahan yang sering dijumpai oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):

1. Keterbatasan modal usaha menjadi permasalahan klasik
2. Kurang pendalaman pengetahuan tentang mengembangkan usaha
3. Minimnya Inovasi Produk
4. Terhambatnya pendistribusian barang
5. Minimnya pemasaran dalam teknologi modern (online)

2.2 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha yaitu dengan memperkuat modal kerja dan juga memperbanyak cabang maupun usaha pembantu. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah (**Djoko, 2015:369**).

2.2.2 Upaya Pengembangan Usaha

Menurut **Budiarto (2015:99)** upaya yang dapat dilakukan untuk perkembangan usaha yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan volume produksi
- b. Mampu melakukan melakukan diversifikasi produk
- c. Mampu mengurangi produk gagal
- d. Menerapkan pencatatan keuangan dan aliran barang
- e. Mampu melakukan kontrol kualitas
- f. Mampu melakukan aktivitas peningkatan kompetensi tenaga kerja
- g. Melakukan peningkatan efisiensi konsumsi bahan bakar
- h. Melakukan pengelolaan limbah sampah
- i. Mengalami peningkatan aset, omset dan tenaga kerja

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh **Sundari Pratiwi (2016)** yang berjudul Strategi Pemberdayaan UMKM Sektor Peternakan Ayam Organik (Studi Pada Koperasi Hidayah Sumatera Utara). Dengan hasil Pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Hidayah adalah dengan memberikan pengetahuan dan pengawasan serta solusi kepada pembudidayaan ayam organik di Medan. Beberapa faktor kegagalan pembudidayaan ayam organik di Medan adalah kualitas bibit yang kurang baik. Selain itu kurangnya sosialisasi dan kurangnya pemahaman masyarakat akan kesehatan juga menyebabkan kegagalan dalam membudidayakan ayam organik di Kota Medan.

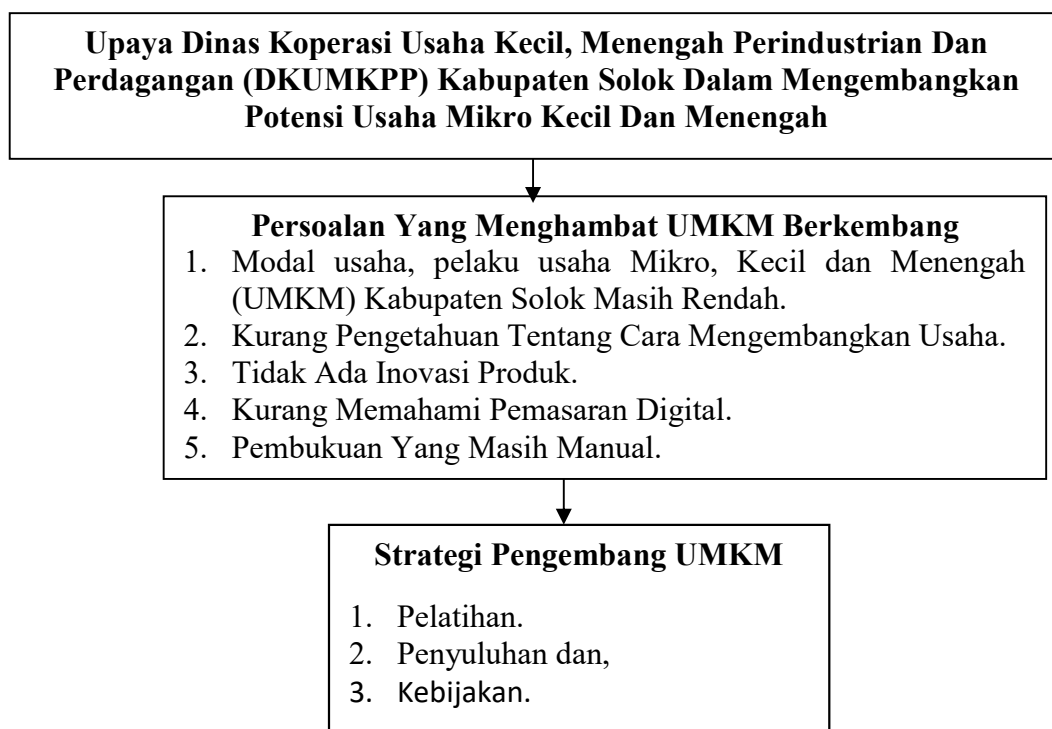
Penelitian oleh Suyadi, Syahdanur dan susie (2017) Dengan hasil umumnya modal pelaku UMKM di kabupaten bengkalis adalah modal sendiri, kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah Keterbatasan pengetahuan bisnis dan manajemen yang dimiliki dan kelemahan dalam pembukuan. Penguasaan teknologi merupakan kendala yang juga banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha. Masih kurang meratanya pembinaan yang dilakukan instansi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu tinjauan mengenai apa yang diteliti dan dituangkan dalam sebuah bagan yang menjadi alur pemikiran penelitian pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut (Mukhtazar, 2020:45) Subjek penelitian adalah informasi atau narasumber yang menjadi sumber riset. Subjek yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Pegawai Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok.

(Mukhtazar, 2020:45) Objek penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam Mengembangkan Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok, beralamat di Jl. Raya Koto Baru Solok, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, nomor telepon: (0755) 20888.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis data

Menurut **Sugiyono (2018:18)** data kualitatif adalah analisis data kualitatif adalah data yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.

Dalam peneliti ini, peneliti menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk menyusun gambaran mengenai objek yang diteliti dengan terlebih dahulu peneliti menggumpulkan data-data di lokasi penelitian, lalu data tersebut diolah dan diartikan untuk kemudian dapat melakukan analisa dan interpretasi dari data yang disajikan.

3.1.2 Sumber Data

Menurut (**Sugiyono, 2018**) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Menurut (**Sugiyono, 2018:456**) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Menurut (**Sugiyono, 2018:456**) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut (**Sugiyono, 2019;126**) Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan rincian tentang Upaya Dinas Koperasi Usaha, Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam Mengembangkan Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2020-2021. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 8 orang.

3.2.2 Sampel

Menurut (**Sugiyono, 2019;126**) sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah keseluruhan kegiatan upaya Upaya Dinas Koperasi Usaha, Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam Mengembangkan Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2020-2021.

3.3 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang diperkirakan mengetahui, menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu subjek penelitian (**Sugiyono, 2016**). Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja dan berhubungan dengan bidang UMKM di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jenis Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala Dinas	Biasa	1 Orang
2.	Kepala Bidang Perdagangan	Kunci	1 Orang
3.	Kepala Bidang Perindustrian	Pelengkap	1 Orang
4.	Kepala Bidang UMKM	Kunci	1 Orang
5.	Kepala Bidang Koperasi	Pelengkap	1 Orang
6.	Pelaku UMKM	Kunci	3 Orang

Sumber : (DKUKMPP) Kabupaten Solok

3.4 Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk menyusun kusioner yang dapat mencerminkan masalah dan model penelitian yang digunakan terlebih dahulu melakukan defenisi operasional variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan

Pelatihan berfungsi untuk mengajarkan bagaimana cara masyarakat dapat memasarkan produknya melalui inovasi kemasan produk, pemeran produk dan pelatihan kewirausahaan. Dan juga untuk mengetahui program-program yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok untuk mengembangkan UMKM.

2. Penyuluhan

Penyuluhan berfungsi untuk mengevaluasi UMKM yang ada di Kabupaten Solok. Agar Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dapat mengetahui kendala yang dialami oleh pelaku UMKM.

3. Pembinaan dan Kebijakan

Variabel ini berfungsi untuk membantu mengembangkan UMKM. Karena dengan adanya kebijakan yang jelas dapat dijadikan pedoman dan arahan dalam melakukan pengembangan UMKM di Kabupaten Solok.

4. Pemasaran Produk

Variabel ini berfungsi untuk melihat bagaimana cara Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok melakukan promosi terhadap hasil UMKM yang ada di Kabupaten Solok.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2018:229);

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan jalan mendatangi objek yang bersangkutan melalui wawancara atau observasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan sehubungan dengan pembuatan skripsi dan dapat dilakukan dengan:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Studi dokumentasi

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

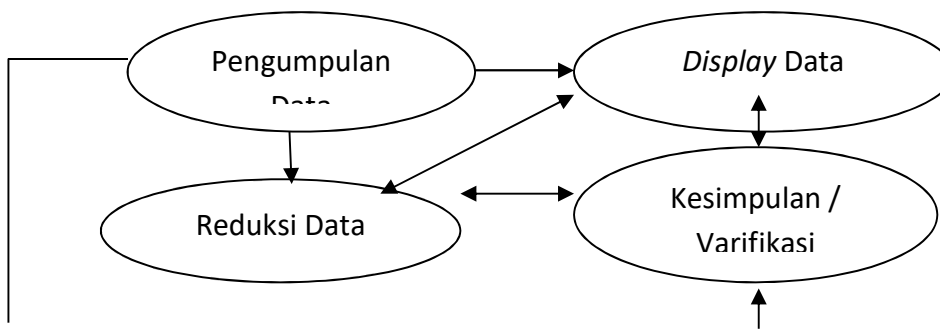
Studi Kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Studi Pustaka Merupakan Suatu Penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.

3.6 Teknik Analisa Data

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) dan dilakukan secara terus-menerus mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis interaktif Hueberman dan Miles (**Sugiyono 2018:246**) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Aktivitas Dalam Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut (**Sugiyono 2018:246**) Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut:

Gambar 3.1
Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman



Sumber: (Sugiyono 2018:246)

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Menurut (**Sugiyono, 2018:247-249**) pengumpulan data adalah suatu proses memperoleh suatu data di lokasi penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut (**Sugiyono, 2018:247-249**) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut (**Sugiyono, 2018:249**) Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam Penelitian Kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *flowchart*, *pictogram* dan sejenisnya.

Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut (**Sugiyono, 2018:252-253**) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Eksistensi UMKM di kabupaten solok memiliki potensi untuk dapat lebih tumbuh dan berkembang. Hal ini dibuktikan dari fakta-fakta yang menunjukkan adanya tingkat perkembangan UMKM dari waktu ke waktu. Pada masa krisis hingga saat ini, sektor UMKM menjadi alternatif pemenuhan kesempatan kerja bagi sekian banyak suplai tenaga kerja yang ada. Selain itu, UMKM dapat dijadikan sebagai solusi pengaman terhadap kondisi ekonomi yang selalu berubah dan terdapat resistensi kondisi ekonomi.

Maka dari itu, sangat dibutuhkan adanya suatu usaha untuk lebih mengembangkan potensi sektor UMKM baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor usaha yang telah terbukti memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi dalam mendorong perekonomian secara regional hingga nasional. Selain itu, sektor usaha menjadi unggulan dalam menyerap tenaga kerja dengan menggunakan sumber daya lokal sehingga hal tersebut menjadi pilar dalam menopang sendi-sendi perekonomian daerah.

Kabupaten Solok cukup memiliki peluang dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM sebagai sebuah langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam usaha pengembangan UMKM, pada umumnya mengalami berbagai hambatan-hambatan. Antara lain pada kualitas SDM yang masih rendah, keterbatasan biaya, dan juga terbatasnya kemampuan dalam hak pemasaran. Pemerintah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok mempunyai tanggung jawab teknis bagi perkembangan UMKM.

Tabel 4.3

**Jumlah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Solok
Tahun 2020-2021**

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
2020	12.167	1.552	61
2021	12.225	1.560	65
Total	24.392	3.112	126

Sumber :dkumkmp Kabupaten Solok

Dari tabel 4.3 dapat kita lihat jumlah usaha berdasarkan kategori usaha mikro, kecil, menengah yang ada di kabupaten pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2020 jumlah usaha mikro yang ada di kabupaten solok sebanyak 12.167 unit usaha, untuk usaha kategori kecil di kabupaten solok berjumlah 1.552 unit usaha dan untuk usaha dalam kategori menengah di kabupaten solok berjumlah 61 unit usaha. Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro yang ada di kabupaten solok sebanyak 12.225 unit usaha, untuk usaha kategori kecil di kabupaten solok berjumlah 1.560 unit usaha dan untuk usaha dalam kategori menengah di kabupaten solok berjumlah 65 unit usaha.

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Solok. Seiring dengan bertambahnya jumlah pelaku UMKM, pesaiangan dalam UMKM juga akan bertambah dan masyarakat juga harus dapat memiliki ide-ide kreatif untuk dapat tetap mempertahankan usaha yang sudah dimulainya. Dan tugas dari Dinas KUKMPP kabupaten solok juga harus dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka.

Strategi pengembangan yang coba dilakukan oleh DKUKMPP kabupaten solok melingkup kedalam pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan. Strategi tersebut kemudian diimplementasikan melalui pelaksanaan beberapa program yang telah di sediakan oleh Dinas

Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dengan harapan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

4.1.1 Pelatihan

Dalam melakukan pengembangan UMKM, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok telah menyusun beberapa kegiatan dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, pembinaan dan kebijakan yang akan diberikan kepada pelaku UMKM guna untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka.

Pelatihan yang diadakan oleh DKUMPP dalam mengembangkan UMKM yaitu pelatihan pemasaran yang berorientasi bagaimana masyarakat memasarkan produknya dengan baik melalui inovasi kemasan produk, pameran produk, dan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan yang dilakukan meliputi (diklat), workshop, dan sosialisasi. Diklat merupakan proses transformasi ilmu dan pengetahuan kepada peserta dalam pengembangan usahanya tersebut. Sementara workshop merupakan forum diskusi yang dibuat oleh DKUMKPP Kabupaten Solok untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan produk-produknya.

Sedangkan sosialisasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyampaikan program-program dan kebijakan terkait pengembangan UMKM oleh DKUMPP Kabupaten Solok. Berikut merupakan jenis pelatihan yang disediakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok tahun 2020-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jenis Pelatihan UMKM Periode 2020-2021

No	Jenis Pelatihan
1.	Hak Paten Merek (HAKI)
2.	PIRT
3.	BPOM
4.	Produk
5.	Penyelia Halal
6.	Packaging
7.	Konten Kreatif
8.	Medsos
9.	Financial Literasi

Sumber :dkumkmp Kabupaten Solok

Dari tabel 4.4 dapat kita ketahui jenis pelatihan yang disediakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam pelatihan Hak Paten Merek pelaku UMKM bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan sendiri merek usaha yang dimiliki atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya dengan ketentuan tertentu, dalam pelatihan pirt akan dijelaskan izin yang harus dimiliki bagi jenis usaha makanan tertentu.

Pelatihan yang dilakukan BPOM guna untuk mengawasi makanan, pelaku UMKM akan diawasi langsung oleh BPOM untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan untuk mendapatkan kestabilan harga dari produk. Dalam penyelia halal akan dibahas tentang kehalalan bahan yang digunakan pelaku UMKM dalam membuat usahanya. Pelatihan medsos digunakan untuk melakukan promosi terhadap produk yang dimiliki pelaku UMKM agar diketahui oleh masyarakat dan dapat menarik minat pembeli.

4.1.2 Penyuluhan

Selain pelatihan, juga ada penyuluhan yang berguna untuk menambah wawasan dari SDM terkait pengembangan UMKM. Penyuluhan yang dilakukan oleh DKUKMPP Kabupaten Solok bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran, baik dalam bentuk kemasan maupun isi produk. Penyuluhan juga bertujuan melakukan koordinasi ke pasar-pasar daerah.

Pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan oleh DKUMKPP Kabupaten Solok langsung disuatu tempat, seperti di kantor wali nagari atau di kantor camat. Kemudian bentuk evaluasinya meliputi proses monitoring hasil daripada kegiatan penyuluhan tersebut. Evaluasi tersebut dalam bentuk laporan pertanggung jawaban akuntansi atau keuangan oleh peserta kepada DKUMKPP Kabupaten Solok.

Selain itu, terdapat kendala teknis yang sering dihapapi dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Kendala yang dimaksud adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pengembangan usaha yang lebih kompleks. Hal ini dikemukakan oleh Kabid UMKM DKUMKPP Kabupaten Solok bahwa sarana dan prasana yang digunakan selama penyuluhan masih bersifat tradisional sehingga *output* yang dihasilkan juga kurang maksimal.

4.1.3 Kebijakan

Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam memberdayakan UMKM. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini DKUKMPP Kabupaten Solok dijadikan sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan UMKM. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Menurut Kabid UMKM DKUKMPP saat ini perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah langsung ditangani oleh Camat. Sementara untuk modalnya semua jenis UMKM yang telah dibiayai pelatihan yang pada periode sebelumnya memperoleh sarana dan prasarananya dalam bentuk uang kini diganti menjadi produk atau barang-barang yang berguna untuk pengembangan umkm.

Sementara mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten solok dalam melakukan evaluasi PP Nomor 23 Tahun 2015 tersebut adalah dengan menganalisis dan melihat perkembangan usaha mulai dari yang mikro, kecil, dan menengah. Kemudian pengawasan dilanjutkan pada sisi modal usaha yang digunakan pada tiap tahunnya, sehingga dapat kita ketahui sejauh mana perkembangan usaha yang telah dijalankan.

4.2 Hasil Wawancara Responden

Pengembangan UMKM tidak terlepas dari peran Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok yang telah dilakukan sampai turun langsung ke lapangan dalam bentuk berbagai kebijakan yang disusun pemerintah dan berbagai program yang dilaksanakan. Tetapi perlu diketahui bahwa disamping peran Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok juga terdapat peran dari para pelaku usaha sendiri.

Di bawah ini penulis akan paparkan beberapa peran Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok yang penulis temukan dari lapangan:

a. Peran DKUMPP sebagai fasilitator

Fasilitator merupakan fasilitas yang berarti penyediaan sarana dan prasarana agar bisa mencapai target yang diinginkan. Jadi kata fasilitator ini berarti pihak yang menyediakan sarana dan prasarana, misalnya pelatihan atau pemberian bantuan seperti barang maupun jasa.

Peran DKUMPP sebagai Fasilitator adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang digunakan selama kegiatan pengembangan. Adanya sarana dan prasarana yang memadai juga dapat menunjang keefektifan kegiatan yang dijalankan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala kelengkapan dan fasilitas seperti tempat kegiatan yang nyaman, SDM pelaksana yang berkualitas, peralatan yang lengkap dan memadai sehingga dapat membuat peserta merasa nyaman dan penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan lancar.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan kabid UMKM berikut ini:

Pertanyaan : Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pengembangan UMKM.

Jawaban : “Kalo Sarana dan Prasarananya itu jelas sangat mendukung. Kami selalu mengutamakan fasilitas yang terbaik. Contohnya kegiatan pelatihan kewirausahaan, untuk mengadakan acaranya itu kan butuh suguhan. Kan nggak mungkin kita ngasih kursus kok gak dikasih konsumsi apa-apa. Selain itu, tempat yang digunakan juga harus nyaman, biasanya kita menggunakan aula, biar gak sumpek. Tentor yang kita datangkan pun harus yang berkompeten dibidangnya. Nah kalo fasilitasnya sudah begitu bagus, pesertanya juga pasti akan senang dan nggak jenuh ikut kegiatan kita. Itulah salah satu contoh pentingnya fasilitas dalam penyelenggaraan tiap program kegiatan”.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada pelaku UMKM, diungkapkan sebagai berikut:

Pertanyaan : Bagaimana dengan sarana dan prasarana yang yang disediakan DKUMKMPP.

Jawaban : “Dalam kegiatan pelatihan yang pernah saya ikuti, sarana dan prasarana yang diberikan sudah cukup memadai. Tempat pelatihannya juga sangat nyaman dan mudah dijangkau. Kalau tempatnya nyaman kan kita juga betah ngikutin acaranya. Selain itu para pengajarnya pun juga enak dan menyenangkan. Materinya jadi mudah dimengerti.”

Lingkungan kerja juga akan sangat mempengaruhi bagaimana kinerja dari pegawai DKUMKMPP. Lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, dan psikologi dalam perusahaan yang memengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Beberapa ahli mendeskripsikan lingkungan kerja sebagai segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang memengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalankan tugas.

Ini sesuai dengan yang diungkapkan Kepala Dinas DKUMKMPP berikut ini:

Pertanyaan : Bagaimana Lingkungan Kerja di DKUMKMPP.

Jawaban : Kantor DKUMKMPP memiliki lingkungan kerja yang harmonis antara atasan dan bawahan terjalin dengan cukup baik.

Pendapa lain juga diungkapkan oleh Kabid Perdagangan mengenai lingkungan kerja DKUMKMPP berikut ini:

Pertanyaan : Bagaimana Lingkungan Kerja di DKUMKMPP.

Jawaban : Lingkungan Kerja bagi saya nyaman-nyaman saja, sepanjang pegawai melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Sama halnya dengan kabid perindustrian juga menanggapi mengenai lingkungan kerja DKUKMPP berikut ini:

Pertanyaan : Bagaimana Lingkungan Kerja di DKUKMPP.

Jawaban : Lingkungan Kerja terbentuk secara kekeluargaan, terjalin dengan sangat baik.

2. Pelatihan

Pelatihan dalam hal ini menjadi strategi bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam melakukan pembinaan dan perkembangan UMKM. Pelatihan melibatkan sumber daya manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembelajaran sehingga mereka akan menggunakannya dalam mengembangkan usaha mereka.

Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok telah menyusun beberapa program pelatihan yang rutin dilakukan. Pelatihan yang ada tidak hanya dari bidang UMKM saja, tetapi ada juga dari bidang lain yang dapat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Pelatihan akan diberikan kepada pelaku UMKM, dengan tujuan untuk menambah pengetahuan pelaku UMKM dan memperdalam keterampilan yang sudah dimiliki.

Seperti yang dikatakan oleh Kabid UMKM ketika diwawancarai:

Pertanyaan : Bagaimana teknik pelatihan yang disediakan DKUKMPP.

Jawaban : “Mulai dari teori sampai dengan tahap akhir. Dengan Sumber Daya Manusia yang kita miliki akan diajarkan dalam bentuk latihan, agar mereka memiliki pengetahuan dasar. Pelatihan akan dimulai dari teori dulu, baru akan ada bertahap sampai dengan praktek di lapangan nantinya.”

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari pelaku UMKM Kabupaten Solok:

Pertanyaan : Apa harapan pelaku UMKM dari pelatihan yang disediakan DKUKMPP.

Jawaban : “Dengan adanya pelatihan saya berharap dapat memajukan usaha-usaha yang agar bisa menembus pasar lokal, serta kalau tuhan mengizinkan bisa menembus pasar regional.” Maka dari itu pelatihan yang akan diadakan DKUKMPP akan saya hadiri minimal untuk menambah pengetahuan saya saat menghadapi kendala yang akan terjadi.

Mengenai kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam pengembangan UMKM lebih kepada peran pelaku usaha yang tidak simultan dalam pelatihan tersebut. Dengan kata lain bahwa masyarakat tertarik mengikuti pelatihan yang dilaksanakan hanya sekedar untuk memperoleh honor, tetapi tidak menerapkan hasil inovasi pelatihan tersebut. Sehingga pelatihan yang diadakan tersebut terkesan formalitas belaka dan dijadikan lahan pemborosan anggaran daerah.

Selain itu penuturan kepala dinas terkait pengembangan UMKM terakhir mengalami kendala, yaitu sebagai berikut:

Pertanyaan : Apa hambatan yang dialami DKUKMPP dalam mengembangkan potensi UMKM.

Jawaban : “ Untuk di kabupaten Solok, setidaknya ada 7 persoalan yang menjadi penghambat UMKM sulit berkembang. Diantaranya

adalah persoalan modal, perizinan, kemasan, SDM pelaku usaha, peralatan, promosi dan pemasaran.”

Khusus untuk masalah permodalan, pihak pemerintah daerah memang tidak mengururkan bantuan modal untuk menstimulasi UMKM yang ada. Hal ini lantaran, selain terkendala oleh aturan penghapusan hibah dan bansos, anggaran yang ada di APBD Kabupaten Solok juga sangat terbatas.

Penuturan Kabid UMKM terkait kendala permodalan yang dialami oleh DKUKMPP Kabupaten Solok dalam mengembangkan UMKM.

Pertanyaan : Apakah Permodalan UMKM di Kabupaten Solok di ambil dari APBD.

*Jawaban : “Tidak, kalau UMKM yang ada dibantu melalui APBD, bisa habis dana APBD oleh DKUKMPP Kabupaten Solok saja.
“DKUKMPP hanya memberikan bantuan berupa peralatan. Contohnya:mesin tenun untuk usaha kerajinan, mesin jahit dan lainnya sesuai kebutuhan pelaku UKM.*

Penuturan Kabid UMKM terkait solusi permodalan untuk pelaku UMKM dalam mengembangkan UMKM.

Pertanyaan : Jika Permodalan UMKM di Kabupaten Solok tidak di sediakan dari anggaran APBD, lalu dari mana pelaku UMKM mendapatkan modal.

*Jawaban : “Pihak DKUKMPP Kabupaten Solok jauh-jauh hari telah menjalankan program kemitraan untuk mencarikan bapak angkat bagi UMKM yang ada. Para pelaku UMKM dibawa untuk temu usaha dengan pihak perbankan dan BUMN, targetnya adalah untuk mendapatkan kucuran modal melalui dana KUR dan CSR. Setidaknya, pada tahun 2018 lalu sebanyak 18 UMKM dapat dana stimulan dengan bunga ringan dari BUMN melalui dana CSR melalui program karya bina lingkungan (PKBL). Sedangkan untuk tahun 2019 belum ada data resmi dari pihak perbankan dan BUMN.
“Tugas kita sebagai pemerintah hanya memfasilitasi, sedangkan proses pengurusan dan pencairannya kita tidak ikut campur.”*

Khusus untuk masalah permodalan, pihak pemerintah daerah memang tidak mengururkan bantuan modal untuk menstimulasi UMKM yang ada. Hal ini lantaran, selain terkendala oleh aturan penghapusan hibah dan bansos, anggaran yang ada di APBD Kabupaten Solok juga sangat terbatas.

Penuturan Kabid koperasi terkait solusi permodalan untuk pelaku UMKM dalam mengembangkan UMKM.

Pertanyaan : Bagaimana solusi permodalan untuk pelaku UMKM.

*Jawaban : “Bidang koperasi juga membantu pelaku UKM dalam memperoleh modal usaha di antaranya dengan memberikan informasi terkait bagaimana cara mendapatkan bantuan permodalan dari lembaga penyedia keuangan baik pihak bank maupun non bank.”
conthnya: koperasi simpan pinjam.*

Penuturan Kepala Dinas terkait Sumber daya manusia yang dialami oleh DKUKMPP Kabupaten Solok dalam mengembangkan UMKM.

Pertanyaan : Bagaimana dengan sumber daya manusia yang dimiliki DKUKMPP sebagai pelaku UMKM.

Jawaban : “Rendahnya pengetahuan pelaku UMKM sangat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan dan diproduksi oleh UMKM. Sehingga produk mereka kurang diminati konsumen.” Contohnya dari segi kemasan yang kurang memikat.”

Pendapat Kabid Perdagangan terkait Sumber daya manusia yang dialami oleh DKUKMPP Kabupaten Solok dalam mengembangkan UMKM.

Pertanyaan : Bagaimana dengan sumber daya manusia yang dimiliki DKUKMPP sebagai pelaku UMKM.

Jawaban : Kualitas baik, namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pendapat Kabid Perindustrian terkait Sumber daya manusia yang dialami oleh DKUKMPP Kabupaten Solok dalam mengembangkan UMKM.

Pertanyaan : Bagaimana dengan sumber daya manusia yang dimiliki DKUKMPP sebagai pelaku UMKM.

Jawaban : Kalau menurut saya sepanjang memenuhi persyaratan, kita ada finger print absen setelah apel pagi ada pendataan dan monitoring untuk melihat kualitas SDM dan sejauh ini baik.

3. Kebijakan

Selain pelatihan dan penyuluhan, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh dalam memberdayakan UMKM. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas DKUKMPP Kabupaten Solok dijadikan sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan UMKM. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Menurut Kabid UMKM DKUKMPP Kabupaten Solok saat ini perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah langsung ditangani oleh Camat. Sementara untuk modalnya semua jenis UMKM yang telah dibiayai pelatihan yang biasanya memperoleh sarana dan prasarannya dalam bentuk uang kini diganti menjadi produk atau barang-barang. Adapun tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015

Penuturan Kepala Bidang UMKM DKUKMPP Kabupaten Solok adalah sebagai berikut.

Pertanyaan : Apa tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 untuk pelaku UMKM.

Jawaban : “Pertama untuk memberdayakan UMKM yang ada di Kab. Solok ini agar dapat bersaing dengan produk lain. Yang kedua tidak membuat jarak birokrasi kepada masyarakat, jadi kita ini terbuka dari dinas dan juga sering memberikan informasi-informasi kepada masyarakat.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh DKUKMPP Kabupaten Solok bertujuan untuk meningkatkan daya saing terhadap produk lain. Selain itu adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah membuat jarak antara birokrasi dengan masyarakat semakin sempit sehingga tidak ada lagi kecanggungan oleh masyarakat kepada pemerintah. Bahkan dengan kebijakan yang ada sebagai media dan pedoman dalam memperoleh informasi terkait perkembangan UMKM di Kabupaten Solok.

b. Peran DKUMPP sebagai Regulator

Dalam penelitian ini, fungsi regulator adalah menentukan peraturan yang mendukung kepada proses jalannya suatu pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM sudah menjalankan fungsi dan perannya sebagai regulator dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM

Dalam penyusunan draft Raperda tersebut, Dinas Koperasi dan UKM bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni Konsultan Kebijakan untuk penyusunan naskah akademik dan draft Raperda tentang Koperasi dan UMKM. Konsultan kebijakan ini bertugas untuk mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tentang Koperasi dan UMKM yang ada di tingkatan Pemerintahan Pusat.

Bertolak dari aturan-aturan pusat tersebut, kemudian disusun peraturan-peraturan baru yang telah disesuaikan dengan kondisi yang di daerah di daerah.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari kepala dinas berikut ini:

Pertanyaan : Bagaimana kebijakan yang di atur DKUKMPP untuk mengembangkan UMKM.

Jawaban : “Dalam penyusunan draft Renstra ini Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok bekerja sama dengan pihak ketiga. Tugasnya adalah mencari referensi-referensi tentang Kebijakan Koperasi dan UMKM di tingkat provinsi. Untuk kemudian disesuaikan dengan keadaan yang ada di daerah itu sendiri. Setelah disesuaikan akan ada yang sesuai dan ada yang tidak. Nah dari itu, kita dapat menambah ataupun mengurangi.”

Hal ini dibenarkan oleh pelaku UMKM berikut ini:

Pertanyaan : Apakah dalam menyusun kebijakan UMKM, DKUKMPP melibatkan pelaku UMKM.

Jawaban : “O iya mas, dulu saya sempat diundang Dinas Koperasi dan UKM untuk rapat dengar pendapat dalam rangka penyusunan kebijakan UMKM. Di situ acaranya ya penjelasan mengenai rancangan yang sedang disusun. Kami dari pihak UMKM juga diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan ataupun masukan mengenai rancangan tersebut. Harapan saya ya semoga kalau sudah jadi kebijakan itu mampu menjadi payung hukum yang jelas bagi jalan usaha kami seterusnya.”

c. Peran DKUMPP sebagai katalisator

Dalam hal ini peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai katalisator yang mengacu terhadap pengembangan dan pemberdayaan UKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 bisa dilihat dari beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM daerah. Jalinan kerja sama dengan para stakeholders.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan kabid koperasi berikut ini:

Pertanyaan : Apakah dalam kegiatan pengembangan UMKM yang dilakukan DKUKMPP dilakukan sendiri.

Jawaban : “Tidak, dalam pelaksanaan semua kegiatan pengembangan ini nggak akan ada artinya tanpa kerja sama dari berbagai pihak yang terkait. Contohnya dari lembaga pemberi bantuan kredit untuk sosialisasi penyediaan modal, dari lembaga

pendidikan untuk pelatihan kewirausahaan, pihak konsultan dalam penyusunan draft raperda, dan beberapa Dinas untuk mengembangkan pasar konsumen. Semua itu kami libatkan agar program kegiatan yang sudah kami rancang bisa berjalan efektif dan efisien serta tepat guna.”

Selain dari yang dipaparkan di atas, peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam produk dan pengolahan adalah dengan bermitra dengan INKA, Telkom, Perbankan, serta Pos Giro. Para pelaku usaha cenderung berminat untuk meminjam modal di Perbankan yang disediakan oleh oleh BUMN dan lainnya melalui CSR (Coorporate Social Responbiity) yang bermakna suatu tindakan yang dijalankan perusahaan sebagai suatu tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan sosial dengan kegiatan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka secara taktis penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam mengembangkan UMKM sudah berjalan optimal. Strategi yang telah dirumuskan bahkan sudah diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, upaya UMKM tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang menghambat terlaksananya pengembangan usaha tersebut.

Adapun hasil penelitian fase inisial menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok telah menyusun formulasi strategi dalam memberdayakan sekaligus mengembangkan UMKM melalui pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan. Sedangkan pada fase partisipatoris menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program ataupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok cukup tinggi. Ini ditandai dengan minat dan keikutsertaan pelaku-pelaku UMKM yang besar pada tiap pelatihan/penyuluhan yang diadakan. Sementara fase emansipatoris menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Solok sudah semakin berkembang.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran kepada seluruh pihak yang bertanggungjawab terhadap upaya Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dalam mengembangkan UMKM. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok sebagai penanggungjawab dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan pelatihan ataupun penyuluhan dapat berjalan optimal dan menghasilkan *output* yang sesuai dengan harapan.
2. Masyarakat sebagai pelaku UMKM seharusnya membuka pemikiran untuk tidak bersikap pragmatis dalam menerima pemberdayaan yang diberikan pemerintah. Dengan adanya pelatihan maupun penyuluhan sebaiknya digunakan sebagai kesempatan dalam

memperoleh ilmu dan pengetahuan terkait pengembangan produk usaha yang lebih inovatif dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (buku, tidak diterbitkan, 2015), h. 12-15
- Dadan Sutrisno, et.all., “Perencanaan Strategis Sektor Usaha Mikro dalam Mengatasi Permasalahan Pemasaran (Studi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)” (Malang: Wacana, 2016)
- Dedy febry, “definisi pengembangan” http://www.academia.edu/4832768/definisi_pengembangan, di unduh pada 6 januari 2019
- Imzar, “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Ucok Durian Medan”, (Medan:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU, Tidak diterbitkan,2018). h. 6-7
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016), hal. 129
- Isnaini Harahap, “analisis dampak penerapan perbankan syariah terhadap sektor UMKM di sumatera utara, (Disertasi , Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana UINSU, 2016), h.79-80
- Marliyah, “Strategi pembiayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM): studi kasus perbankan syariah di sumatera utara”,(Disertasi, Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana UINSU, 2016), h.89
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*, 3e. Apri Nuryanto, editor. Bandung: Alfabeta,Cv.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah